

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Adanya dominasi dari perusahaan – perusahaan multinasional terhadap penguasaan sumber daya alam yang cukup bernilai, saat ini sudah menjadi fenomena umum yang kerap terjadi di berbagai negara. Hal seperti ini dapat terjadi tak lain karena didukung oleh kebijakan – kebijakan pemerintah yang seringkali berat sebelah. Untuk itu keterkaitan antara politik dan lingkungan tidak akan pernah bisa dilepaskan. Dengan mempengaruhi kebijakan negara, perusahaan – perusahaan multinasional tersebut seakan memperoleh legalitas untuk menguasai (memonopoli) sumber daya alam setempat, mengusur dan meniadakan hak – hak penduduk asli (*indigenous people*), dan bahkan melakukan degradasi lingkungan (perusakan lingkungan).<sup>1</sup> Degradasi lingkungan merupakan salah satu dampak nyata dari berbagai macam aktifitas industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan multinasional tersebut. Sedangkan Negara – Negara Dunia Ketiga adalah negara yang paling banyak mengalami permasalahan mengenai degradasi lingkungan akibat hal tersebut, dikarenakan kebanyakan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk menjalankan industri di dunia berada di Negara – Negara Dunia Ketiga.

Isu lingkungan sering kali sangat bersifat politis, di satu sisi, menyangkut negara dan sekutunya dan, di sisi lain, mereka yang memiliki sedikit kekuasaan. Tindakan untuk melindungi lingkungan barangkali akan menggoda komitmen para pejabat negara dan penentu kebijakan di Dunia Ketiga jika hal itu tampaknya menguntungkan secara pribadi. Pengambilan sumber daya yang berharga memang menjadi strategi untuk yang banyak dipakai oleh pemerintah Dunia Ketiga untuk memperoleh pendapatan. Mereka selalu menyatakan untuk mengalokasikan hak pengambilan sumber daya itu demi sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat. Tetapi itu juga berarti bahwa mereka itu mempunyai kepentingan yang telah

---

<sup>1</sup> Ton Dietz, *Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: Insist Press, 2005), hlm. viii-ix.

mapan untuk menjaga atau memperoleh yurisdiksi sumber berharga tersebut.<sup>2</sup> Faktanya, pada banyak kasus degradasi lingkungan yang terjadi di Negara Dunia Ketiga, masyarakat lokal justru adalah pihak yang paling dirugikan. Masyarakat lokal dirugikan tidak hanya dihadapkan pada situasi akan kelangkaan sumber daya alam maupun rusaknya lingkungan, tapi juga berakibat pada hilangnya sumber perekonomian mereka (yang biasanya masih tergantung pada lingkungan sekitar). Hal inilah yang terjadi di Nigeria, tepatnya di Ogoni, kawasan Delta Niger, negara bagian Rivers State.

Sebagai salah satu dari sepuluh negara terbesar yang memproduksi minyak di dunia, minyak telah menjadi salah satu sumber devisa terbesar bagi Nigeria semenjak ditemukannya sumber daya alam tersebut pada awal tahun 1950-an.<sup>3</sup> Nigeria pun menjadi pengeksport minyak terbesar diantara negara – negara di Afrika. Akibat ekspor minyak tersebut, pendapatan negara (Nigeria) meningkat dari 219 juta naira<sup>4</sup> pada tahun 1970 menjadi 10,6 milyar naira pada tahun 1979. Program – program pembangunan strategis yang dilakukan oleh pemerintah semuanya terfokus pada pengembangan industri minyak di Nigeria, dan bagaimana mendatangkan para pemodal asing di Nigeria. Nigeria pun menjadi target utama dari perusahaan – perusahaan multinasional. Perusahaan - perusahaan minyak multinasional telah mendominasi eksplorasi di Nigeria. Misalnya saja perusahaan minyak *Shell Petroleum Development Company (SPDC)*, yang telah mengontrol kurang lebih 60% pasar minyak di Nigeria.<sup>5</sup> Terdapat kompleksitas dan kepentingan yang begitu besar terhadap industri minyak di Nigeria. Sumber daya alam yang bagi banyak pihak mendatangkan keuntungan yang besar karena kelangkaan dan kegunaannya dalam semua sektor kehidupan.

---

<sup>2</sup> Jeff Haynes, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil Dunia Ketiga: “Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir”* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000), hlm.171

<sup>3</sup>Bill Turnbull W.F., “Nigeria-the Ogoni Dilemma”, diperoleh dari <http://dSPACE.dial.pipex.com/suttonlink/327ni.html>, diakses pada Rabu, 17 September 2008, pukul 22.13 WIB.

<sup>4</sup> Mata uang Nigeria. Naira menggantikan Pound sebagai mata Nigeria semenjak tahun 1973. (Lihat Rotimi S. Suberu, *Federalism and Ethnic Conflict in Nigeria* (Washington DC: United States Institute of Peace Press, 2000)), hlm. 55.

<sup>5</sup>“Nigeria Petroleum Pollution in Ogoni Region”, diperoleh dari <http://www.american.edu/TED/OGONI.HTM>, diakses pada Senin, 15 September 2008, pukul 14.16 WIB.

Sudah sejak tahun 1956 *SPDC*, telah menanamkan modalnya di Nigeria. Sebagai akibat dari masuknya Shell ke Nigeria, pada tahun 1960an – 1970an perusahaan – perusahaan multinasional lain mulai berdatangan dan menanamkan modalnya di Nigeria, seperti Chevron, Mobil, AGIP, ELF, dan Texaco.<sup>6</sup> *SPDC* pertama kali beroperasi di Delta Niger pada tahun 1958, ketika ditemukan minyak pertama kali di kawasan tersebut. Saat itu Nigeria masih berada di bawah koloni Inggris, sehingga Ogoni, seperti halnya etnis minoritas lain di Delta Niger, tidak memiliki daya dan kemampuan untuk menolak eksploitasi minyak yang terjadi di wilayah mereka.<sup>7</sup> Pengelolaan SDA pada kurun waktu tersebut dikelola langsung oleh dua institusi secara langsung, yaitu perusahaan – perusahaan multinasional seperti Shell dan pemerintah yaitu *Nigerian National Petroleum Company (NNPC)*. Baru pada tahun 1978 setelah dikeluarkannya dekret oleh pemerintah pusat, pengelolaan SDA termasuk minyak, kewenangannya berada di tangan pemerintah negara bagian yaitu di bawah *Nigerian Petroleum Development Company (NPDC)* yang juga merupakan perpanjangan *NNPC* di wilayah negara bagian, sehingga pihak Shell harus bekerjasama dan berhubungan secara langsung dengan pemerintah negara bagian, (dalam hal ini adalah negara bagian Rivers State)<sup>8</sup>. Bisa dibayangkan seberapa kuat posisi tawar masing – masing pihak (negara maupun pihak Shell) dalam hal ini. Tarik menarik kepentingan akan semakin kuat di antara kedua pihak tersebut.

Melihat Nigeria yang kaya akan minyak, sangat potensial bagi negara ini untuk menjadi salah satu negara yang cukup sejahtera di benua Afrika. Namun sebelumnya, patut diketahui, bahwa Nigeria sendiri memiliki sejarah tradisi rezim militer yang kuat. Kooptasi oleh pihak militer telah menjadi tradisi politik di Nigeria. Seperti yang banyak terjadi di Negara – Negara Dunia Ketiga, kebanyakan negara memiliki peranan dan kepentingan yang cukup kuat dalam pengelolaan sumber daya alam, begitu pula dengan industri minyak di Nigeria. Kuatnya peranan negara tersebut, secara langsung melibatkan peran pemerintah

---

<sup>6</sup> Olayemi Akinwumi, *Crises and Conflicts in Nigeria, a Political History Since 1960* (Munster: LIT-Verlag, 2004), hlm. 117.

<sup>7</sup> Crisis Group, *Nigeria: Ogoni Land after Shell*, Crisis Group Africa Briefing N° 54, 18 September 2008, hlm.2.

<sup>8</sup> Bill Turnbull, *loc.cit.*

(yang merupakan rezim militer) sebagai kekuatan negara dalam industri minyak di Nigeria. Semenjak militer mengambil alih kekuasaan di Nigeria pada tahun 1966, perekonomian negara yang tadinya tergantung kepada pertanian semakin menurun. Seluruh jajaran administrasi militer yang memegang pemerintahan (mulai dari pusat hingga negara bagian) mulai menaruh perhatian kepada industri minyak daripada pertanian, dikarenakan keuntungan yang didapat lebih besar. Pertanian yang tadinya menjadi komoditas ekspor utama Nigeria, digantikan oleh minyak.<sup>9</sup>

Kuatnya peranan militer merupakan salah satu bentuk kekuatan politik pemerintah di samping kewenangan terbesar mereka dalam membuat kebijakan, baik itu menguntungkan bagi negara itu sendiri, pihak pemodal (*SPDC*) ataupun masyarakat lokal. Negara pun secara langsung dituntut untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi para pemodal, baik itu dengan mensejahterakan masyarakat lokal agar industri minyak di tanah Ogoni dapat berjalan lancar tanpa adanya tuntutan dari masyarakat lokal, atau sebaliknya, melakukan represi pada masyarakat lokal demi menghindari gangguan maupun tuntutan dari masyarakat lokal. Keberpihakan dan kepentingan negara akan terlihat jelas di sini. Di sisi lain, rezim yang korup, baik militer maupun sipil, telah merampas kesejahteraan ekonomi yang seharusnya diterima masyarakat akibat kekayaan sumber daya alam mereka, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Nigeria justru memiliki standar hidup yang relatif rendah di antara negara – negara Sub Sahara Afrika.<sup>10</sup>

Masyarakat lokal sendiri adalah pihak yang sepatutnya tidak boleh dilupakan, apalagi mengingat keberadaan sumber daya alam tersebut berada di tanah yang sudah sejak lama mereka tempati, seperti yang terdapat di Ogoni, daerah Delta Niger.<sup>11</sup> Hampir sebagian besar perekonomian masyarakat Ogoni yang tergantung dari pertanian dan perikanan mau tidak mau juga mengalami perubahan akibat hadirnya industrialisasi minyak di tanah mereka. Karena

---

<sup>9</sup> Olayemi Akinwumi, *op.cit.*, hlm. 108.

<sup>10</sup> Carlene J. Edie, *Politics in Africa: A New Beginning?* (Canada: Wadsworth, 2003) hlm. 40.

<sup>11</sup> Daerah Delta Niger sendiri adalah daerah di negara bagian Rivers State yang merupakan daerah pusat produksi minyak. Di daerah ini terdapat 12.000.000 penduduk yang berasal dari berbagai macam etnis. (Lihat Olayemi Akinwumi, *op.cit.*, hlm. 108) Setiap tanah di sana dinamakan sesuai etnis yang menempati, dan Ogoni adalah salah satunya.

terjadinya marjinalitas (*marginality*), dan sumber daya alam yang semakin langka (*scarcity*) akibat degradasi lingkungan yang mereka terima, semakin lama masyarakat semakin sadar dan tergerak untuk melancarkan tuntutan dan melakukan perlawanan terhadap negara (yang saat itu berada di bawah rezim militer) dan pihak Shell. Hingga akhirnya pada tahun 1990-an bentuk perlawanan mereka berubah menjadi sebuah gerakan lingkungan bernama *Movement for the Survival of the Ogoni Peoples (MOSOP)*, yang dipimpin oleh Ken Saro-Wiwa.

Setelah munculnya sebuah perlawanan dari bawah (dalam hal ini *grassroots actor*), konflik ekologi politik yang terjadi di Ogoni semakin tajam. Negara, di bawah pemerintahan Jendral Abacha, kerap melakukan tindakan represif, bahkan hingga menyangkut kasus pelanggaran HAM. Sementara *MOSOP*, dan masyarakat Ogoni terus berjuang menyuarakan aspirasi dan penderitaan mereka dengan melakukan aksi damai dan kampanye yang berhasil menyita perhatian dunia internasional saat itu. Dengan berdasarkan pada kapasitas kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki, masing – masing aktor masih mengedepankan kepentingannya masing – masing, terutama dalam cara pandang mereka terkait permasalahan lingkungan akibat industri minyak. Kedua belah pihak, baik negara maupun masyarakat Ogoni selama kurun waktu 1993-1998 masih terus terlibat dalam konflik yang berkepanjangan dan tidak pernah terselesaikan, hingga kematian Jendral Abacha tahun 1998 (karena serangan jantung), yang kemudian digantikan oleh pemerintahan Jenderal Abdulsalam Abubakar.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Konflik ekologi politik merupakan sebuah konsekuensi logis dari hubungan yang asimetris yang terjadi antara pemerintah, perusahaan multinasional yang terkait, dan juga masyarakat lokal. Selain kekeliruan yang memberi prioritas pada pertumbuhan ekonomi, salah satu kekeliruan lain dari pola pembangunan bagi kebanyakan negara selama ini adalah persepsi umum tentang kegunaan sumber daya alam. Sebagaimana dilontarkan oleh Naess, kekayaan alam selalu dibaca dan dilihat semata – mata sebagai sumber daya ekonomi yang siap dieksploitasi demi pertumbuhan ekonomi. Ketika kekayaan alam dibaca sebagai

sumber daya ekonomi, kecenderungan yang tidak bisa dielakkan adalah bagaimana mengubah sumber daya alam tersebut menjadi nilai ekonomi yang riil bagi kemakmuran sebuah bangsa. Konsekuensinya, segala nilai lain dari kekayaan alam tersebut menjadi terabaikan dan tidak diperhitungkan sama sekali.<sup>12</sup> Konflik ekologi politik kerap terjadi di banyak negara Dunia Ketiga yang kaya akan sumber daya alam, dimana sebagian besar kekayaan sumber daya alam tersebut justru dieksploitasi oleh negara dan perusahaan multinasional.

Pemerintah, pihak *SPDC* maupun masyarakat lokal idealnya adalah tiga aktor utama yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam minyak bumi di daerah Ogoni, di Delta Niger. Memang, sumber daya alam minyak telah menjadi salah satu sumber daya alam yang begitu berharga dan bernilai tinggi di dunia saat ini. Untuk itu masyarakat lokal yang tinggal di daerah yang kaya akan sumber daya alam minyak bumi ini sudah seharusnya mendapatkan kesejahteraan yang layak pula akibat nilai minyak bumi yang tinggi. Namun tidak ada peran yang signifikan dari masyarakat Ogoni untuk mengelola sumber daya alam di tanah mereka mereka semenjak masuknya perusahaan multinasional dalam mengelola minyak bumi di Delta Niger. Yang terjadi adalah dampak negatif yang sebagian besar merugikan masyarakat Ogoni, akibat eksploitasi sumber daya minyak yang dilakukan oleh Shell, yaitu degradasi lingkungan. Masyarakatpun melakukan perlawanan dan tuntutan akan dampak ekologis dari aktivitas industri minyak tersebut. Adanya bentuk perlawanan dari masyarakat lokal kepada negara dan perusahaan multinasional ini, membuat konflik ekologi politik di Ogoni mendapat perhatian internasional

Akibat dari eksploitasi minyak yang dilakukan oleh *SPDC* di Ogoni, dampak sosial dan lingkungan yang selama ini diabaikan pun terjadi, yaitu degradasi lingkungan. Mulai dari kerusakan kehidupan alam dan keanekaragaman hayati, hilangnya kesuburan tanah, polusi udara dan air untuk minum, degradasi pada tanah pertanian, dan rusaknya ekosistem baik di darat maupun di air. Semua polusi itu terjadi akibat semburan gas, di atas pipa – pipa yang menyalurkan minyak, penimbunan limbah dari penyulingan minyak dan juga tumpahan – tumpahan minyak. Dengan beroperasinya perusahaan minyak tersebut di tanah

---

<sup>12</sup>A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm.171.

Ogoni secara langsung telah menyebabkan kerusakan pada hutan hujan tropis dan vegetasi bakau yang secara ekonomi merupakan area yang sangat vital bagi industri perikanan lokal dan industri lokal lainnya. Pencemaran terhadap tanah juga telah menyebabkan lahan tersebut tidak dapat lagi ditanami tumbuhan, padahal pertanian merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat Ogoni.<sup>13</sup>

Masalah degradasi lingkungan di atas telah menjadi masalah yang serius terutama bagi masyarakat Ogoni yang merasakan langsung dampaknya. Karena implikasinya cukup nyata dan berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan mereka nanti. Mulai dari masalah ekonomi, kesehatan hingga kebutuhan sumber daya alam bagi masa depan mereka yang berujung pada kelangkaan (*scarcity*) sumber daya alam. Secara ekonomi pun masyarakat Ogoni sebagai salah satu etnis minoritas di Nigeria tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak walaupun salah satu sumber utama pemasukan negara berada di tanah mereka. Masyarakat cenderung termarginalkan (*marginality*). Walaupun Shell sendiri telah memberikan pertanggungjawaban dengan memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar, namun pertanggungjawaban yang mereka berikan tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi. Terutama degradasi lingkungan yang untuk memulihkannya memerlukan waktu yang lama, atau mungkin tidak dapat dipulihkan kembali.

Berbagai tuntutan pun dilakukan masyarakat Ogoni, dan tuntutan – tuntutan tersebut pada akhirnya diorganisasikan menjadi sebuah gerakan lingkungan yang bernama *Movement for the Survival of the Ogoni Peoples (MOSOP)*. Berbagai bentuk perlawanan dan tuntutan pun dilakukan oleh *MOSOP*, mulai dari lobi, hingga aksi damai. Negara juga mulai campur tangan dengan melakukan represi kepada masyarakat lokal. Situasi terus berkembang antara negara dan masyarakat lokal, terutama menyangkut konteks degradasi lingkungan yang berpengaruh bagi banyak hal. Pertentangan terus terjadi dan berbagai peristiwa serta usaha dilakukan oleh masing – masing pihak untuk mencapai kepentingan mereka masing – masing. Permasalahan semakin berkembang menjadi sebuah konflik ekologi politik, karena tuntutan *MOSOP* tidak hanya

---

<sup>13</sup> “*Nigerian Petroleum Pollution in Ogoni Region*”, *loc.cit.*

tuntunan dalam hal ekonomi, tapi juga harus ada peran dan kebijakan pemerintah yang menjamin hak keberlangsungan dan pemeliharaan (konservasi) lingkungan sekitar. Konflik yang terjadi pun semakin berlarut – larut, karena masing – masing pihak memiliki kepentingan yang begitu kuat. Terdapat dinamika konflik dan kepentingan yang cukup signifikan antara masyarakat lokal dan negara.

Peneliti ingin mengidentifikasi konflik kepentingan yang terjadi hanya pada masyarakat lokal dan negara. Sedangkan untuk pihak *Multi National Corporation (MNC)* sendiri tidak menjadi subjek utama peneliti dikarenakan *MNC* sendiri memiliki posisi yang sudah cukup jelas yaitu lebih kepada keuntungan ekonomi jika dibandingkan dengan kepentingan dari pemerintah dan masyarakat lokal.

Yang dimaksud peneliti sebagai otoritas negara adalah rezim militer yang berkuasa pada tahun 1993 – 1998. Sedangkan masyarakat lokal di sini adalah masyarakat Ogoni (*grassroot actor*) yang pada kemudian membentuk sebuah gerakan lingkungan bernama *MOSOP*. Peneliti juga memberi batasan waktu, sekitar tahun 1993-1998 dikarenakan beberapa hal. *Pertama*, dikaitkan dengan periode pemerintahan rezim militer baru (di bawah Jendral Sani Abacha) yang baru mulai memerintah pada tahun 1993 hingga tahun 1998. *Kedua*, dalam kurun waktu tersebut konflik antara negara dan masyarakat lokal sedang mencapai titik klimaksnya hingga mendapatkan perhatian internasional. Hal ini ditandai dengan terjadinya akselerasi dan eskalasi konflik melalui berbagai aksi baik dari negara maupun masyarakat lokal hingga menyangkut masalah kekerasan fisik dan pelanggaran HAM. *Ketiga*, guna memudahkan dan membataskan peneliti dalam mengidentifikasi konflik kepentingan yang terjadi. Hal ini dikarenakan rentang waktu konflik yang cukup panjang dan berlarut – larut.

Untuk itu dengan mengacu kepada dua subjek utama (negara dan masyarakat lokal), maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

***Bagaimana konflik kepentingan yang terjadi antara negara dan masyarakat Ogoni dalam kurun waktu tahun 1993-1998 akibat dampak eksploitasi sumber daya alam (minyak) di Ogoni, Nigeria, dapat dijelaskan melalui perspektif ekologi politik?***

### **1.3. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk melakukan deskripsi dan analisa mengenai terjadinya konflik kepentingan karena eksploitasi sumber daya alam (minyak) di tanah Ogoni, Nigeria. Dengan mengemukakan satu kasus di salah satu negara berkembang (Dunia Ketiga) yang sebagian besar memiliki masalah dalam hal ekologi politik terutama dalam hal eksploitasi sumber daya alam. Dengan demikian setidaknya dapat memberikan gambaran mengenai situasi yang kerap terjadi beserta kecenderungan, strategi dan kepentingan – kepentingan yang biasanya dikedepankan oleh aktor – aktor yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana dan masukan strategi yang lebih lengkap kepada kelompok gerakan lingkungan, pemerintah dan masyarakat di Indonesia pada umumnya.

#### **1.3.2. Signifikansi Penelitian**

Beberapa signifikansi penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya adalah:

1. Peneliti ingin mengembangkan cara pandang dalam salah satu ranah baru dalam ilmu politik kontemporer (yaitu ekologi politik) yang saat ini memang masih sangat sedikit akademisi ahli ilmu politik yang mengkhususkan diri pada kajian dalam ranah ekologi politik. Kajian dalam ranah ekologi politik yang menyangkut kebijakan (regulasi) negara, tindakan manusia maupun masyarakat yang secara langsung maupun tidak berkaitan dengan keberadaan, kuantitas maupun kualitas alam dan lingkungan sebagai salah satu elemen utama dalam kehidupan manusia di muka bumi ini.
2. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana tindakan dan kepentingan politik dari negara dan masyarakat lokal di Negara Dunia Ketiga seperti di Nigeria dalam menyikapi eksploitasi sumber daya alam yang secara nyata telah membawa dampak akan terjadinya degradasi lingkungan di negara mereka.

## 1.4. Kerangka Konseptual

### 1.4.1. Ekologi Politik di Negara Dunia Ketiga

Inti dari kajian ekologi politik adalah meletakkan analisis politik pada urutan pertama dengan tujuan untuk berusaha menjelaskan bagaimana interaksi antara manusia dengan lingkungan memiliki keterkaitan dengan menyebarnya degradasi lingkungan.<sup>14</sup> Lebih dalam lagi, kajian dalam ekologi politik di Negara Dunia Ketiga ini melakukan eksplorasi lebih dalam lagi akan keterkaitan antara kemiskinan dan kesejahteraan, degradasi lingkungan dan proses politik yang kerap terjadi di Negara Dunia Ketiga. Bagaimanapun keterkaitan antara politik dan ekologi tidak berada dalam posisi yang sejajar. Ini merupakan sebuah dampak, akibat peranan politik yang lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan masalah ekologi sekarang ini dibandingkan dengan masa lalu sebagai sebuah konsekuensi sosial dan perubahan teknologi yang menimbulkan permasalahan lingkungan. Dengan kata masalah lingkungan tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang menyangkut berbagai macam kepentingan. Menurut Neuman dan Schoeder juga menyebutkan bahwa ada dinamika kepentingan dan kompleksitas interaksi antar aktor, baik yang terlihat (*place*) maupun yang tidak terlihat (*non-place*) dalam konflik, dan masalah lingkungan ini tentunya merupakan bagian integral dalam kajian ekologi politik di Negara Dunia Ketiga.<sup>15</sup>

Ekologi politik terbagi secara umum hampir sama dengan perspektif ekonomi politik, tapi ekologi politik sendiri memiliki bermacam – macam pendekatan untuk mengaplikasikan perspektif tersebut pada investigasi akan interaksi antara lingkungan dan makhluk hidup di Negara Dunia Ketiga. Beberapa pendekatan tersebut diantaranya adalah:<sup>16</sup>

#### 1. *Environmental Problems Approach*

Pendekatan ini menitikberatkan pada masalah lingkungan secara spesifik, seperti erosi, deforestasi, polusi air ataupun degradasi lingkungan.

#### 2. *Concept Approach*

---

<sup>14</sup> Raymond L. Bryant, “Power, Knowledge and Political Ecology in The Third World: A Review”, *Progress in Physical Geography*, 22, 1 (1998) pp. 79-94, hlm. 80.

<sup>15</sup> Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey, *Third World Political Ecology* (London and New York: Routledge, 1997), hlm.6-8.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 20-24.

Pendekatan ini menitikberatkan pada sebuah konsep yang biasanya ada dan memiliki keterkaitan yang cukup penting untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan yang muncul seputar masalah ekologi politik, seperti pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), resiko lingkungan, bencana, kerapuhan (*vulnerability*), maupun masalah kehutanan.

### 3. *Regional Political Ecology Approach*

Pendekatan ini menekankan kajian ekologi politik berdasarkan wilayah kawasan, yang masing – masing memiliki karakteristik dan permasalahan berbeda. Kawasan tersebut diantaranya Afrika Barat, Asia Tenggara, maupun Afrika Utara.

### 4. *Socio-economic Characteristics Approach*

Pendekatan ini mengeksplor pertanyaan – pertanyaan yang sering muncul pada ranah ekologi politik dengan menekankan kepada karakteristik sosial ekonomi seperti kelas, etnisitas, maupun gender.

### 5. *Actor Approach*

Pendekatan ini menekankan kebutuhan akan fokus kepada kepentingan, karakteristik dan aksi dari berbagai macam aktor dalam memahami konflik ekologi politik. Pendekatan yang berfokus kepada kepentingan aktor (*actor oriented-approach*) digunakan untuk memahami konflik – konflik yang terjadi sebagai akibat dari interaksi yang terjadi antara aktor- aktor yang berbeda yang memiliki perbedaan tujuan dan kepentingan.

Kelima pendekatan yang ada dalam ekologi politik ini tidaklah harus berdiri sendiri atau digunakan terpisah – pisah satu sama lain. Banyak para ilmuwan ilmu politik yang mengkombinasikan beberapa pendekatan atau menggunakan pendekatan berbeda dalam tema – tema yang berbeda di dalam penelitian mereka. Namun demikian, dalam membahas mengenai keadaan di negara dunia ketiga, pendekatan yang digunakan akan lebih terfokus pada pendekatan aktor. Untuk itu, dari kelima pendekatan di atas, penelitian ini akan menggunakan pendekatan yang terakhir, yaitu *actor approach*. Dengan lebih menekankan lagi kepada kepentingan negara dan masyarakat, dalam hal ini adalah pemerintah Nigeria dan masyarakat Ogoni, di Nigeria.

Hal ini didasarkan pada beberapa pendapat para akademisi seperti Moore yang menyatakan secara berulang – ulang bahwa tidak ada area politik yang cukup memadai di dalam ekologi politik di Negara Dunia Ketiga. Hal ini juga didukung dengan beberapa penelitian pada akhir tahun 1970an hingga pertengahan tahun 1980-an, dan pernyataan tersebut menjadi semakin diperbaharui pada tahun 1990-an. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Neumann, Peluso, maupun Rocheleau dan Ross pada tahun 1990-an telah membuka sebuah wacana baru dalam level politik mikro yang menginformasikan adanya konflik ekologi dan keterkaitan yang terjadi di level lokal. Penelitian dalam level politik mikro ini telah memberi banyak informasi tentang dimensi lokal dalam ekologi politik, tapi dengan sedikit informasi tentang teori yang lebih luas dan perbandingan yang signifikan antara tipe – tipe aktor yang termasuk di dalam interaksi lokal.<sup>17</sup>

Ada beberapa keuntungan yang dapat dijelaskan melalui pendekatan ini terutama dalam menggambarkan konflik ekologi yang kerap terjadi di Negara Dunia Ketiga. Pertama, dengan melihat peran umum dan aktor – aktor signifikan terkait di dalam perubahan lingkungan yang terjadi di Negara Dunia Ketiga, kita dapat meletakkan penemuan – penemuan empiris dalam penelitian di dalam level lokal secara teoritis dan dengan perspektif perbandingan. Kedua, dengan mengintegrasikan secara teoritis dan perbandingan di dalam peran dan signifikansi dalam aktor – aktor yang berbeda, kita mencoba untuk menghasilkan sebuah gambaran yang komprehensif dan layak mengenai motivasi, kepentingan dan aksi yang dilakukan oleh aktor – aktor terkait, melalui cara maupun kecenderungan yang muncul lewat studi ekologi. Ketiga, dengan memberi penekanan akan peran dan interaksi dari aktor – aktor yang terlibat dalam konflik ekologi politik di Negara Dunia Ketiga, mengulangi pertanyaan mengenai kepentingan utama akan politik di dalam studi ekologi politik.<sup>18</sup>

Terlihat secara jelas dan nyata bagi kita semua, bahwa ada dua hal mendasar yang menjadi inti akan pengertian yang begitu berarti akan aspek politik di dalam studi ini. *Pertama*, sebagai sebuah apresiasi, bahwa politik adalah

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>18</sup> *Ibid.*

mengenai interaksi diantara aktor – aktor tersebut terkait masalah lingkungan dan sumber daya. *Kedua*, sebagai sebuah pengakuan bahwa rata - rata aktor – aktor yang lemah juga memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk bertindak untuk mendapatkan kepentingan mereka. Poin yang pertama menegaskan bahwa politik adalah sebuah proses dimana aktor – aktor tersebut turut ambil bagian dan memainkan peran yang sentral, lebih jauh lagi, interaksi yang terjadi diantara aktor – aktor tersebut merupakan bahan utama dari kajian politik. Sementara dalam poin yang kedua mengelaborasi adanya dugaan akan adanya sinyal kepercayaan bahwa ekologi politik di Negara Dunia Ketiga harus melanjutkan pergerakannya jauh dari pemikiran strukturalisme pada tahun 1980-an dan harus memberikan perhatian penuh akan peran dari agen – agen yang terlibat di dalam hubungan manusia.<sup>19</sup>

Perkembangan ilmu ekologi politik yang disertai dengan fenomena tidak berimbangya kekuasaan negara atas rakyatnya dalam usaha memperebutkan sumberdaya alam telah menciptakan istilah-istilah tersendiri. *Pertama* adalah istilah *marginality* yang merupakan akibat hubungan asimetris dari kekuasaan politik, ekonomi dan ekologi terhadap masyarakat. *Kedua* adalah *pressure of production on resources*. Pengertian ini lahir dengan dampak pada degradasi kualitas dan kuantitas alam sebagai akibat dari tekanan sistem kapitalis yang menguras alam demi permintaan ekonomi pasar dunia. *Ketiga* adalah pengenalan sistem *plurality* sebagai sebuah sikap toleransi dan pemahaman atas keberadaan, kepentingan dan nilai-nilai hidup alam dan sebuah masyarakat yang kadang berbeda dengan yang lainnya. Ketiga konsep yang diperkenalkan oleh Blaikie ini berasal dari pemahamannya bahwa kenikmatan hidup seseorang mungkin dapat berarti penderitaan hidup orang lain, “*one person profit’s may be another’s toxic dump*”.<sup>20</sup>

Untuk lebih memberi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kepentingan – kepentingan yang dikedepankan oleh para aktor yang terlibat dalam konflik ekologi politik, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.24-25.

<sup>20</sup> Susan Paulson, Lisa L. Gezon dan Michael Watts, “Locating the Political in Political Ecology: An Introduction”, *Human Organization*, Vol. 62, hlm. 205-206.

interkonektivitas aspek – aspek dalam kajian ekologi politik di Negara Dunia Ketiga. Hal tersebut akan di jelaskan dalam sub bab berikutnya.

#### **1.4.2. Interkonektivitas Dalam Kajian Konflik Ekologi Politik di Negara Dunia Ketiga**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ekologi politik memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan ekonomi politik, dan bahkan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekonomi politik di sebuah negara. Dalam penelitian ekologi politik, kita memang harus terlebih dahulu melihat dan menempatkan bagaimana lingkungan manusia berinteraksi dan memiliki keterkaitan dengan penyebaran kerusakan lingkungan di dunia. Kaitan antara kebijakan politik, kepentingan ekonomi serta kerusakan lingkungan menjadi masalah yang cukup kompleks yang terjadi di dunia.<sup>21</sup>

Ekologi politik dimulai dari premis utama bahwa perubahan lingkungan bukanlah proses netral yang merupakan tanggung jawab dalam manajemen secara teknis. Lebih dari itu, memiliki sumber daya politik, kondisi, dan percabangan yang berhubungan di atas meluasnya ketidaksetaraan dalam hal sosial-ekonomi dan juga proses politik. Beberapa hubungan asumsi kerja dikemukakan oleh para ilmuwan ekologi politik. *Pertama*, mereka menerima masukan bahwa biaya dan keuntungan yang berhubungan dengan perubahan lingkungan adalah merupakan bagian utama yang didistribusikan diantara para aktor terkait secara tidak adil. *Kedua*, para ilmuwan ekologi politik berasumsi bahwa distribusi yang tidak adil dalam biaya lingkungan dan keuntungan, memperkuat atau mengurangi meluasnya ketidakadilan dalam sosial-ekonomi. Asumsi ini menguatkan kembali poin utama bahwa perhatian akan pembangunan dan lingkungan tidak dapat dipisahkan- dan bahwa semua perubahan akan kondisi lingkungan akan berdampak kepada ekonomi maupun politik secara *status quo* dan sebaliknya. *Terakhir*, para ilmuwan ekologi politik juga berpendapat, bahwa perbedaan dampak sosial ekonomi yang terjadi akibat perubahan lingkungan juga memiliki implikasi politik dalam hal perubahan kekuasaan yang dimiliki aktor – aktor tertentu yang berhubungan dengan aktor – aktor lainnya. Dengan demikian

---

<sup>21</sup> Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey, *op.cit*, hlm. 20.

perubahan lingkungan tidak hanya menyebabkan kesejahteraan yang signifikan bagi beberapa pihak maupun kemiskinan bagi yang lainnya, namun juga dengan cara demikian dapat merubah kemampuan aktor – aktor di dalamnya untuk melakukan kontrol atau resistensi terhadap aktor lainnya.<sup>22</sup> Perubahan lingkungan yang terjadi di sebuah negara tidak akan lepas dari pengaruh ataupun interaksi sebab akibat antara ekonomi maupun politik. Aktor – aktor yang terkait dalam permasalahan ekologi politik akan selalu terkait pula dengan permasalahan ekonomi politik dan hal ini kebanyakan juga terjadi di Negara Dunia Ketiga.

Para ilmuwan ekologi politik banyak yang telah melakukan eksplorasi secara sistematis dalam konteks Negara Dunia Ketiga, dan kebanyakan dari mereka telah menempatkan perhatian mereka pada dimensi harian dan episodik di dalam sebuah proses politisasi lingkungan. Hal dikarenakan beberapa hal seperti tidak adanya gejala yang benar – benar natural yang terjadi pada dua dimensi tersebut. Dengan kata lain perubahan maupun dampak yang terjadi dari kedua dimensi tersebut memiliki keterkaitan dan pengaruh yang kuat dari unsur manusia itu sendiri. Di sisi lain, dalam kedua dimensi tersebut ada interkoneksi dalam proses politisasi lingkungan yang terjadi. Dimensi harian maupun episodik memiliki keterkaitan yang erat dalam proses perubahan lingkungan secara fisik. Misalnya saja bencana banjir yang terjadi memiliki keterkaitan erat dengan terjadinya deforestasi. Hal terakhir yang semakin menguatkan penggunaan kedua dimensi tersebut adalah bahwa kedua dimensi tersebut memiliki keterkaitan yang juga cukup erat akan terjadinya ketidakadilan ekonomi sosial.<sup>23</sup>

Walau bagaimanapun, dalam memahami ekologi politik kita juga tidak boleh melupakan hubungan kekuasaan di dalamnya. Seperti yang dikemukakan oleh Bryant:<sup>24</sup>

“Hubungan yang tidak seimbang antara aktor – aktor yang ada merupakan faktor kunci dalam memahami pola interaksi antara manusia dan alam maupun dalam masalah – masalah lingkungan yang berhubungan, semakin terakumulasi di kebanyakan Negara Dunia Ketiga. Hubungan tidak seimbang yang ada haruslah dibuat menjadi setara, termasuk dalam hal kekuasaan yang dimiliki oleh tiap aktor baik dalam

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.28-29.

<sup>23</sup> Raymond L. Bryant, hlm. 84-85.

<sup>24</sup> Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey, *op.cit.*, hlm. 32.

jumlah besar atau lebih kecil, karena hal ini dapat mempengaruhi hasil dari konflik akibat dampak ekologis yang terjadi di Negara Dunia Ketiga. Kekuasaan, bagi para ilmuwan ekologi politik merupakan konsep kunci dalam usaha untuk menentukan peta hubungan dalam proses politisasi lingkungan.”

Dalam penelitian ini, kajian akan kepentingan – kepentingan dan aksi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat menjadi sebuah kajian utama. Ada perjuangan dan interaksi antara aktor – aktor tersebut untuk mengontrol maupun menguasai sumber daya alam, sehingga menjadi penting dan signifikan untuk melihat interaksi aktor – aktor tersebut dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang juga menyangkut kepentingan ekonomi politik. Dapat digambarkan secara umum, bahwa kajian ekologi politik mencakup, pada peran dan signifikansi aktor – aktor yang terlibat di dalam permasalahan lingkungan di Negara Dunia Ketiga. Dengan menyatukan teori dengan gambaran mengenai aktor – aktor yang berperan, ekologi politik secara tidak langsung juga menyajikan gambaran mengenai kepentingan – kepentingan dari aktor – aktor tersebut dalam konflik lingkungan yang memiliki nilai politis dan seringkali memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan ekonomi.

## **1.5. Kerangka Teori**

### **1.5.1. Teori Negara Otoriter Birokratis (*Bureaucratic-Authoritarianism State*)**

Teori Negara Otoriter Birokratis ini dikemukakan oleh Guillermo O'Donnell. Teori mengenai Negara Otoriter Birokratis menurut O'Donnell adalah sebuah model negara yang merupakan perluasan dari rezim otoriter, yang secara umum memiliki karakteristik diantaranya; adanya pembatasan, ketiadaan tanggung jawab, adanya pluralisme politik, tanpa adanya elaborasi dan pedoman ideologi, kecuali di beberapa poin di dalam pembangunan mereka, dan dimana seorang pemimpin, atau sebuah kelompok kecil, menggunakan kekuasaannya di dalam kapasitas yang tidak terbatas, tapi sesungguhnya dapat diprediksi. O'Donnell mengidentifikasi otoriter birokratis sebagai sebuah bentuk baru dari

otoritarianisme.<sup>25</sup> O'Donnell menggunakan teori ini untuk menjelaskan kecenderungan yang terjadi di Amerika Latin pada tahun 1960. Dia berargumen bahwa bentuk pengalaman otoritarian yang dialami oleh Amerika Latin merupakan sebuah kisah baru, karena berdasarkan pada peran serta dari para teknokrat modern dan organisasi militer profesional, daripada politisi yang populis ataupun militer tradisional yang kuat. Untuk lebih menjelaskan kecenderungan tersebut, ia menyebutnya dengan istilah Negara Otoriter Birokratik (*Bureaucratic-Authoritarianism State*).<sup>26</sup>

Birokrasi sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah sifat tambahan mengenai elemen berupa manajemen mengenai negara dan ekonomi, bersamaan dengan penolakan terhadap para korporat dan rezim populis di masa lampau, termasuk pada organisasi - organisasi bentukan (serikat, partai - partai, dll) dan kelompok - kelompok kepentingan lain yang telah turut ambil bagian dalam aliansi populis. Dengan kata lain dengan organisasi rasional modern otoriter birokratis dan ketidakpedulian rezim tersebut terhadap pemeliharaan legitimasi akan kelompok - kelompok kunci di dalam masyarakat dan gerakan rakyat yang populer, otoritarianisme hampir selangkah mendekati totalitarianisme secara langsung, walaupun dengan singkat berhenti untuk menempatkan secara terus menerus ideologi mereka secara total atau melakukan mobilisasi massa. Dalam pandangannya yang utama, O'Donnell mengemukakan hal mendasar yang penting mengenai kecenderungan sosial dari rezim dalam Negara Otoriter Birokratis. Rezim dalam Negara Otoriter Birokratis kebanyakan lebih menyandarkan pada sebuah koalisi antara elit - elit militer dengan pihak teknokrat bisnis yang dalam kerjanya memiliki hubungan secara langsung dengan modal asing.<sup>27</sup>

Untuk itu dalam teori ini O'Donnell sangat mengaitkan masalah otoritarianisme dengan tahap pembangunan ekonomi. Ketika pemerintah melakukan pembangunan ekonomi dengan substitusi impor, rezim yang ada bersifat nasionalis, dan demokratis. Setelah negara memberlakukan kebijakan

---

<sup>25</sup> Thomas M. Leonard, "Bureaucratic Authoritarianism State", *Encyclopedia of the Developing World* (New York, London: Routledge, Taylor & Francis, 2006), hlm.207.

<sup>26</sup> Guillermo O'Donnell, "Democratization, Political Engagement and Agenda Setting Research", dalam Gerardo Luis Munck dan Richard Owen Snyder, *Passion, Craft, and Method in Comparative Politics* (Baltimore: JHU Press, 2007), hlm 273.

<sup>27</sup> Thomas M. Leonard, *op.cit.*, hlm.208.

industrialisasi berorientasi ekspor, pemerintah lebih berpihak pada pemodal, terutama pemodal asing yang akan memberikan modal dan teknologi dan akses ke pasar internasional. Teori Negara Otoriter Birokratis membuka jalan akan sebuah analisis mengenai kecenderungan negara di bawah rezim militer. Lebih jauh lagi, menurutnya bentuk baru dari otoritarianisme ini muncul sebagai akibat dari konflik politik yang disebabkan oleh substitusi import yang merupakan salah satu model dari industrialisasi yang diadopsi oleh negara – negara Amerika Latin.<sup>28</sup>

Di Negara Dunia Ketiga seperti di Amerika Latin, industrialisasi yang terjadi tidak menghasilkan pemerintahan yang demokratis, tapi justru malah menghasilkan rezim otoriter birokratik. Mereka meniadakan kelas - kelas subordinat (dengan melakukan perang kotor) dan untuk itu mereka sangat anti demokrasi.<sup>29</sup> Pemerintah secara terus menerus menolak tuntutan-tuntutan politik para pemimpin masyarakat terutama yang berasal dari kelas bawah. Para pemimpin rakyat juga disingkirkan dari kedudukan-kedudukan politik yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan yang di lakukan oleh negara. Oleh karena itu, sebagai akibatnya pemerintah menjadi sangat mandiri dalam menghadapi masyarakatnya.<sup>30</sup>

O'Donnell mengkhawatirkan akan kemungkinan bertahannya rezim birokratik otoriter lebih lama dari pada rezim otoriter konvensional. Menurut O'Donnell, modernisasi yang terjadi di negara dunia ketiga melalui industrialisasi justru dapat menyebabkan berdirinya dan menguatnya struktur otoritarian daripada aksi mobilisasi untuk menghapus itu semua. Perbedaan antara tipe rezim otoriter dan otoriter birokratis adalah rezim otoriter birokratis jauh lebih stabil dan permanen karena memiliki hubungan dan jaringan dengan sumber daya modal asing dan pembangunan ekonomi. Untuk memenuhi permintaan akan sumber daya modal, teknokrat dengan dukungan rezim militer yang mengambil alih kekuasaan, menciptakan rezim otoriter birokratis. Kekuasaan seringkali didistribusikan diantara kelompok - kelompok elit, daripada seorang pemimpin otoriter. Karena tidak ada penguasa tunggal yang dapat melakukan

---

<sup>28</sup> Guillermo O'Donnell, dalam Gerardo Luis Munck dan Richard Owen Snyder, *op.cit.*

<sup>29</sup> Thomas M. Leonard, *op.cit.*, hlm.209.

<sup>30</sup> Arif Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi* (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 109.

pertanggungjawaban secara penuh pada sistem semacam itu.<sup>31</sup> O'Donnell juga mengemukakan betapa peningkatan dan *deepening* (pendalaman) industrialisasi akan menimbulkan ketegangan yang tidak bisa dihindarkan antara negara dan masyarakat. Dalam perspektif O'Donnell situasi ini timbul karena keruntuhan yang tidak bisa dielakkan dalam mediasi antara negara dan masyarakat, yang akhirnya menuju kepada krisis legitimasi suatu negara.<sup>32</sup>

### 1.5.2. Negara dalam Kajian Ekologi Politik di Negara Dunia Ketiga

Dalam konteks ekologi politik, negara merupakan salah satu aktor penting yang tidak hanya bertanggung jawab mengenai regulasi akan kepentingan pihak kapitalis saja. Menurut Johnston, peran negara yang terlalu menitikberatkan sebagai fasilitator dari sistem kapitalis berkaitan erat terhadap terjadinya masalah degradasi lingkungan yang merupakan produk dari sistem kapitalisme. Sedangkan menurut Walker, daripada menjadi aktor yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi, negara justru memiliki kecenderungan untuk memperburuk keadaan. Hal ini semata – mata juga dikarenakan sebuah paradoks akan fungsi dari negara itu sendiri. Peran negara yang seperti ini kebanyakan terjadi di negara – negara Dunia Ketiga seperti di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Di negara – negara tersebut, masalah konservasi tidak berada dalam prioritas utama dalam setiap kebijakan yang mereka keluarkan. Seharusnya negara memperhatikan masalah konservasi lingkungan dengan melihat sejumlah alasan yang memang berkaitan dan berdampak pada keamanan internal dan kontrol sosial. Inisiatif negara untuk melakukan konservasi di sini maksudnya adalah perlunya peran dimana negara dapat dengan tegas menggunakan kewenangan mereka di atas masyarakat dan lingkungan (secara konsisten diantara kedua subjek itu) dari kontrol yang selama ini begitu lemah. Sehingga dengan demikian dapat menguatkan posisi negara dalam relasinya dengan aktor – aktor yang lain.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Steven J. Hood, *Political Development and Democratic Theory: Rethinking Comparative Politics* (New York, London: M.E. Sharpe, 2004), hlm. 63.

<sup>32</sup> Guillermo O'Donnell, "Tension in the Bureaucratic-Authoritarian State and the Question of Democracy, dalam David Collier (ed.), *The New Authoritarianism in Latin America* (New Jersey: Princeton University Press, 1978), hlm. 75.

<sup>33</sup> Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey, *op.cit.*, hlm. 54-55.

Memang, kebanyakan Negara Dunia Ketiga memiliki memiliki kepentingan ekonomi, politik dan strateginya sendiri yang akan memperolehnya dari posisi/letak sosio-spasial yang berada di persimpangan urutan kepentingan politik domestik maupun dalam sistem antar negara. Maksud dari pernyataan ini adalah, bahwa dalam prakteknya, kepentingan antara negara dan pihak kapitalis tidak selalu sama. Permasalahan utama dari poin ini adalah, bahwa usaha negara untuk melakukan konservasi lingkungan yang selektif akan membawa negara berhadapan dengan para pihak kapitalis. Bryant kemudian menambahkan, bahwa seringkali konflik terpusat tidak hanya pada sumber daya alam yang dapat dieksploitasi secara komersil, tapi lebih kepada kondisi di bawah terjadinya sejumlah eksploitasi, misalnya pembatasan dalam aktivitas penebangan dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan produksi yang berlawanan dengan aktivitas '*cut and run*' yang sering kali dilakukan oleh kapitalis.<sup>34</sup>

Konservasi lingkungan untuk itu jarang dilihat oleh negara sebagai sebuah akhir atau solusi dari degradasi lingkungan yang terjadi. Tapi lebih dilihat sebagai sebuah akhir dari kepentingan politik dan ekonomi yang ada. Terkadang, daripada mengarahkan kebijakan kepada keterkaitan antara degradasi dan konservasi, negara lebih dilihat sebagai aktor yang jarang mengeluarkan satu suara (bermuka dua). Negara lebih terlihat sebagai sebuah *amalgam* dari kepentingan – kepentingan sebuah institusi. *Amalgam State* adalah konsep yang menggambarkan sikap dualisme negara dalam menghadapi konservasi atau kebijakan yang pro lingkungan. Sifat ini dapat dilihat dalam bentuk interaksi antara agensi dalam negara tersebut. *Amalgam State* terkait dengan dua fungsi ambiguitas negara, yakni apakah sebagai '*developer*' atau '*destroyer*' lingkungan.<sup>35</sup>

Menurut Walker, yang menjadi inti dari penjelasan mengapa negara menjadi perusak lingkungan adalah dengan mengetahui adanya sebuah paradoks akan fungsi dari negara itu sendiri. Dampaknya adalah, adanya bawaan akan keberlangsungan konflik secara potensial antara peran negara sebagai pihak '*developer*', dan sebagai pelindung dan juga sebagai pihak yang mengurus lingkungan alam dimana pada akhirnya banyak masyarakat secara luas tergantung

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.65.

pada lingkungan alam tersebut. Paradoks ini akan dinilai melalui sebuah pertimbangan akan praktek manajemen lingkungan di Negara Dunia Ketiga semenjak Perang Dunia Ke-2 (dimana banyak negara di Asia dan Afrika mendapatkan kemerdekaannya). Konservasi lingkungan mendapatkan prioritas yang cukup rendah di Negara – Negara Dunia Ketiga. Tujuan Negara – Negara tersebut dalam waktu dekat kebanyakan tertuju kepada tuntutan akan kontrol politik oleh negara atas kehidupan masyarakat di dalam teritori yang dibawah hukum negara, seringkali berada di dalam konteks yang menyebabkan semakin menyebarnya kerusuhan sosial. Hal ini terjadi dikarenakan banyak negara tersebut yang masih mengadopsi kebijakan lingkungan yang ditinggalkan pada masa kolonial.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Bryant;<sup>37</sup>

“Dalam beberapa tingkatan yang lebih luas lagi, kebijakan irasional yang kerap kali dikeluarkan oleh pemerintah Negara – Negara Dunia Ketiga mungkin dapat merefleksikan kebutuhan ekonomi (kepentingan ekonomi). Banyak Negara Dunia Ketiga yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi akan produksi dan ekspor produk – produk primer. Banyak pemimpin di Negara – Negara Dunia Ketiga memiliki sedikit pilihan, karena itu mereka tetap melakukan kegiatan yang terus menerus berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dengan absennya sumber daya lain sebagai sumber pendapatan nasional.”

Berlangsungnya ketidakseimbangan antara pembangunan dan konservasi yang dititikberatkan dalam kebijakan dan implementasi di Negara Dunia Ketiga juga berkaitan dengan beberapa faktor politik. Urusan keamanan nasional telah mempengaruhi keputusan negara untuk mendorong aktivitas ekonomi yang berakibat bagi hancurnya lingkungan telah menjadi catatan tersendiri. Berkaitan akan hal ini, perhatian kita tidak hanya berhubungan dengan adanya ancaman dari luar, tapi mungkin merefleksikan kegelisahan elit – elit yang berkuasa atas adanya ancaman terhadap keamanan nasional yang muncul dari kelompok – kelompok tertentu di dalam negara. Kecenderungan untuk lebih terfokus kepada ancaman internal terhadap stabilitas mungkin menggambarkan ingatan secara institusional tentang kejadian ekonomi dan politik yang menimbulkan trauma di masa lalu

<sup>36</sup> K.J. Walker, “The State in Environmental Management: The Ecological Dimensions”, *Polical Studies* Volume 37, Issue 1, (March 1989), 25-38, hlm. 32.

<sup>37</sup> Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey, *op.cit.*, hlm. 59.

yang mengancam kekuasaan negara. Hal ini juga menggambarkan masalah politik dan ekonomi baru – baru ini yang berhubungan dengan adanya kekacauan/pemberontakan dalam skala kecil maupun masalah kepemilikan lahan yang kronis yang dialami oleh kelompok – kelompok tertentu.<sup>38</sup>

Korupsi yang terjadi di tengah – tengah para elit politik senior seringkali menjadi faktor selanjutnya yang menghalangi terjadinya keadilan dalam manajemen di Negara Dunia Ketiga. Salah satu alasan penting kenapa banyak pemerintah di Negara Dunia Ketiga gagal untuk melakukan penjaagaan terhadap lingkungan lebih daripada semua hal yang dapat digambarkan secara teoritis adalah tidak lain adanya kepentingan ekonomi politik. Seperti yang digambarkan oleh Lewis pada pertengahan tahun 1990-an, bahwa;<sup>39</sup>

“Di banyak bagian Negara Dunia Ketiga, rezim pencari rente (*‘rent seeking’*), sekarang ini berada dalam kekuasaan, beberapa diantaranya begitu serakah yang mungkin dapat disebut sebagai *‘kleptocracies’*. Dengan demikian karakteristik utama dari proses politik di banyak Negara Dunia Ketiga dapat digambarkan dengan adanya kedekatan dan hubungan saling menguntungkan antara negara dan para pemimpin bisnis.”

Aspek penting dari kerjasama tersebut, pada gilirannya merupakan sebuah kerjasama untuk mengedepankan aktivitas ekonomi yang berbahaya bagi lingkungan dan juga untuk kepentingan – kepentingan dari aktor – aktor tersebut yang dalam waktu dekat dapat berdampak bagi terjadi degradasi. Lebih dalam lagi, sejumlah kerjasama antara pihak bisnis dan negara telah menjadi sumber dari banyaknya perubahan secara fisik terhadap lingkungan dan juga terhadap konflik yang berhubungan, hal ini juga merupakan salah satu inti dari wacana politisasi lingkungan.<sup>40</sup>

Cliffe dan Moorsom, Hedlun, dan O’Brien pada tahun yang berbeda juga mengatakan bahwa konflik ekologi politik lokal dalam ranah relasi antar kelas dan eksploitasi sumber daya alam yang memiliki keterkaitan dengan produksi kapitalis global. Peran dari politik lokal untuk memfasilitasi akses terhadap sumber daya

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>39</sup> Martin W. Lewis, *Green Delusions: An Environmentalist Critique of Radical Environmentalism* (North Carolina: Duke University Press, 1992), hlm. 218.

<sup>40</sup> Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey, *op.cit.*, hlm. 62.

alam lokal dan juga resiko akan terjadinya konflik seringkali dilupakan, di sisi lain perdebatan mengenai peran aktor – aktor yang terlibat di dalamnya (negara, perusahaan multinasional, masyarakat lokal) juga cenderung dipinggirkan atau mungkin sering terlupakan oleh waktu. Negara terkadang dilihat sebagai bagian yang lebih kecil dari agen kapitalis, demikian mengaburkan semua otonomi potensial dari aktor vis a vis modal tersebut, dan penggolongan kepentingan – kepentingan birokratik yang selalu mempengaruhi arah kebijakan negara.<sup>41</sup>

### 1.5.3. *Grassroots Actors* dalam Kajian Ekologi Politik di Negara Dunia Ketiga

Salah satu tema sentral dalam kajian ekologi politik semenjak kelahirannya adalah permasalahan opresi politik dan ekologi terhadap *grassroots actors* oleh para pemilik kekuasaan seperti negara dan pihak pebisnis. Lingkungan sendiri di dalam Negara Dunia Ketiga merupakan sumber utama mata pencaharian dari para *grassroots actors* tersebut. Bisa dikatakan bahwa isu mengenai sumber mata pencaharian dari para *grassroots actors* ini adalah isu utama yang sering bergulir di Negara Dunia Ketiga, terutama dalam kaitannya dengan dampak krisis lingkungan akibat implikasi politik.<sup>42</sup> *Grassroots actors* disini bisa diterjemahkan dengan sebutan masyarakat lokal/adat.

Hubungan antara mata pencaharian dari masyarakat lokal dan perubahan lingkungan sekitar mereka biasanya dapat dilihat dan terjadi di daerah – daerah urban ataupun daerah pedesaan di Negara Dunia Ketiga. Banyak dari aktivitas mata pencaharian sangat bergantung pada sumber daya alam di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Menurut Elliot, bagi para masyarakat adat tinggal di daerah ini merupakan sebuah bentuk keberlanjutan mereka dalam jangka pendek (yang merupakan fokus utama mereka) dan untuk ini mereka sepenuhnya bergantung pada sumber daya alam sekitar.<sup>43</sup> Sedangkan di sisi lain saat ini kebanyakan kesempatan ekonomi yang terkandung dalam sumber daya alam di daerah – daerah urban itu seringkali dimanfaatkan justru sebagian besar bukan oleh masyarakat adat tersebut. Melainkan oleh para investor yang biasanya

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm.13.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.158-159.

<sup>43</sup> Jennifer A. Elliot, *An Introduction in Sustainable Development: The Developing World* (London: Routledge, 1994), hlm. 63.

bekerjasama dengan negara. Sehingga akses mereka akan sumber mata pencaharian secara tidak langsung akan semakin terbatas, dan yang biasanya terjadinya adalah implikasi negatif berupa kerusakan lingkungan yang harus mereka terima.

Implikasi penting lainnya yang kemungkinan besar terjadi akibat situasi ini biasanya adalah munculnya keinginan dari para masyarakat lokal tersebut untuk mengatur sumber daya alam yang ada di tanah mereka. Hal ini dirasa tidak berlebihan, mengingat masyarakat lokal biasanya sangat menghormati lingkungan tempat tinggal mereka, di samping juga karena mata pencaharian mereka tergantung kepada pengelolaan sumber daya alam yang ada tersebut.<sup>44</sup> Seringkali penguasaan sumber daya alam sekitar tidak hanya berdampak pada keterbatasan akses dan degradasi lingkungan saja, tapi juga menyebabkan terjadinya marjinalisasi (*marginalization*) maupun kelangkaan (*scarcity*). Dengan kata lain sebagian besar penguasaan sumber daya alam di Negara Dunia Ketiga selalu berujung pada kerapuhan (*vulnerability*) masyarakat lokal, ketergantungan mereka akan sumber daya alam sekitar yang tiba – tiba harus dibatasi, sementara di sisi lain tidak ada keuntungan yang signifikan yang seharusnya diterima mereka akibat eksplotasi sumber daya alam tersebut oleh negara dan pihak pemodal.

Melihat berbagai implikasi negatif di atas, sangat wajar jika timbul resistensi dari masyarakat lokal terhadap perusahaan dan praktek – praktek eksploitasi sumber daya alam di tanah mereka yang dilakukan oleh pihak luar. Terutama jika rezim yang berkuasa adalah rezim otoritarian yang cenderung akan melakukan tekanan kepada masyarakat lokal. Bahkan sekalipun rezim yang berkuasa adalah rezim demokratis, melihat kepada keadaan politik dan ekonomi mereka yang termarginalisasi, tidak mudah bagi mereka untuk melancarkan tuntutan dan aksi protes kepada negara terhadap ketidakadilan yang selama ini mereka terima. Yang terjadi selanjutnya bisa menyangkut kepada beberapa kemungkinan, masyarakat hanya semakin termarginalkan dengan kata lain mereka tidak kuasa untuk melakukan perlawanan yang signifikan, karena negara telah melemahkan mereka secara struktural maupun ekonomi. Seperti yang dikatakan

---

<sup>44</sup> Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey, *op.cit.*, hlm. 160.

ole Blaikie dan Brookfield, “*if you can’t beat them, you join them*”.<sup>45</sup> Alih – alih melakukan perlawanan, masyarakat justru bergabung dalam hal perusakan lingkungan.

Sedangkan kemungkinan lainnya (yang biasanya juga banyak terjadi) adalah munculnya sebuah gerakan dari kalangan masyarakat lokal tersebut. Yang dalam kasus degradasi lingkungan biasanya akan bertransformasi menjadi sebuah gerakan sosial lingkungan masyarakat lokal (*grassroot organizations*). Seperti yang dikemukakan oleh Price, Eccleston dan juga Potter melalui penelitian mereka masing – masing bahwa rezim otoritarian seringkali (atau juga dengan secara tidak sengaja mendorong kemunculan *grassroot organizations* di Negara – Negara Dunia Ketiga.<sup>46</sup> Sedangkan menurut Peet dan Watts, keadaan yang demikian juga semakin mendorong terbentuknya *grassroot organizations* yang bersifat independen dan mandiri (*self-help*) di Negara – Negara Dunia Ketiga Tersebut. Berkembangnya kemampuan untuk dari organisasi – organisasi ini untuk menempatkan dan menyuarakan kepentingan sosial lokal dan permasalahan lingkungan tanpa dukungan utama yang berasal dari negara tampak merefleksikan adanya perubahan yang besar dalam hubungan negara-masyarakat sipil di Negara Dunia Ketiga.<sup>47</sup>

Berbagai macam kebohongan yang dilakukan oleh otoritas negara mengakibatkan semakin berkembangnya kepentingan politik berupa aksi protes maupun sifat *self-help* dari organisasi – organisasi tersebut saat ini. Apapun alasan yang melatarbelakangi perkembangan dari organisasi ini, bagaimanapun, semua bentuk dari organisasi ini mengintegrasikan isu akan lingkungan maupun perhatian akan pembangunan, dan di sisi lain cukup berbeda dari sejumlah Organisasi Lingkungan Non – Pemerintah lainnya di Negara Dunia Pertama maupun Negara Dunia Ketiga. *Grassroot organizations* yang dimaksud di sini, secara mengejutkan, lebih memberikan perhatian akan ketergantungan mata pencaharian para aktornya pada keberlangsungan lingkungan. Kedua, aksi protes yang dilakukan oleh *grassroots organizations* adalah aksi politik yang paling

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

<sup>47</sup> Richard Peet dan Michael Watts, *Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements* (London: Routledge, 1996), hlm. 32.

memungkinkan untuk mereka lakukan dengan tujuan utama untuk mempublikasikan sejumlah praktek yang dilakukan oleh aktor – aktor yang berkuasa yang banyak bertentangan dengan kepentingan masyarakat lokal. Sejumlah *grassroots organizations* dibangun sebagai sebuah reaksi kolektif akan rencana ataupun meluasnya aktivitas yang membahayakan sumber mata pencarian masyarakat lokal. Selain itu pula, adanya hubungan antara *grassroots organizations* tersebut dengan Organisasi Lingkungan Non Pemerintah tingkat nasional maupun internasional dalam hal advokasi, telah menjadi faktor vital yang menentukan kesuksesan mereka.<sup>48</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Friedman dan Rangan:<sup>49</sup>

“Ketergantungan terhadap aktor – aktor luar akan menjadi ciri – ciri umum selanjutnya bagi kebanyakan grassroot organization di Negara Dunia Ketiga. Lebih dalam lagi, tema yang menonjol dalam kerangka kerja para ilmuwan ekologi politik mengenai grassroot organisation adalah mengenai fakta bahwa aktor – aktor eksternal seringkali memainkan peranan penting dalam pembangunan *grassroots organizations* tersebut.”

Terakhir, kita tidak boleh melupakan pentingnya peranan tokoh ataupun pemimpin dari *grassroots organizations* tersebut bagi arah perjuangan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Bryant mengenai *grassroot organizations* di Negara Dunia Ketiga:<sup>50</sup>

“Bahwa walaupun banyak *grassroots organizations* mengadopsi struktur demokratis di dalam organisasinya, hal ini tidak berarti bahwa pemimpin terkemuka (secara individu) ataupun ‘*opinion-formers*’ tidak memainkan peranan penting dalam perkembangan aktivitas grassroot organizations ini. Di satu sisi beberapa grassroot organization tidak memiliki sebuah identifikasi akan adanya pemimpin maupun komite terpilih. Namun beberapa grassroot organization lain yang berkembang mulai dari dasar, yang didominasi oleh campur tangan penuh oleh sejumlah pemimpin aktivis di awal permulaannya, telah membentuk sejumlah besar kesatuan yang menciptakan sebuah komite pimpinan, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para konstituen mereka.”

---

<sup>48</sup> Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey, *op.cit.*, hlm. 176.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>50</sup> *Ibid.*,

#### 1.5.4. Konflik Sosial Yang Berkepanjangan (*Protracted Social Conflict*)

Istilah konflik sosial yang berkepanjangan (*PSC*) ini dikemukakan oleh Edward Azar. Dalam rangkaian kajian berkelanjutan yang dipublikasikan sejak tahun 1970-an, faktor kritis dalam konflik sosial yang berlarut – larut (*PSC*), seperti yang terus terjadi di Libanon, Sri Lanka, Filipina, Irlandia Utara, Ethiopia, Israel, Sudan, Cyprus, Iran, Nigeria, atau Afrika Selatan, adalah bahwa konflik itu merepresentasikan perjuangan berkepanjangan yang seringkali penuh kekerasan oleh kelompok komunal untuk keperluan dasar seperti keamanan, pengakuan dan penerimaan, akses yang adil bagi institusi politik, maupun dalam partisipasi ekonomi dan sumber daya alam. Kesibukan tradisional dalam hubungan antar negara dilihat sebagai sesuatu yang mengaburkan pemahaman yang sesuai tentang dinamika ini. Peran negara dapat memuaskan atau mengecewakan kebutuhan dasar komunal, dan karenanya dapat mencegah atau justru menimbulkan konflik.<sup>51</sup>

Istilah *PSC* menekankan bahwa sumber – sumber konflik terutama terletak di dalam negara dan bukannya antara negara, dengan empat kelompok variabel yang diidentifikasi sebagai prakondisi bagi transformasi mereka terhadap tingkatan intensitas yang tinggi. *Pertama*, ada kandungan komunal, fakta bahwa unit analisa yang paling berguna dalam situasi *PSC* adalah kelompok identitas – rasial, religius, etnis, budaya, dan yang lain. Sebagai kebalikan dari tingkat analisa terkenal yang dipopulerkan oleh Kenneth Waltz, yang di dalam bentuk klasiknya membedakan tingkatan sistem, negara dan individual, analisa *PSC* lebih memfokuskan pada kelompok identitas, apa pun definisinya, dengan memperhatikan bahwa yang berada dalam inti masalah adalah hubungan antara kelompok identitas dan negara (yang oleh Azar dinamakan disartikulasi antara negara dan masyarakat sebagai satu kesatuan) dan bahwa kepentingan dan keperluan individual diperantarai melalui keanggotaan kelompok sosial. Azar menghubungkan disjungsi antara negara dan masyarakat di berbagai belahan dunia dengan sebuah warisan kolonial yang secara artifisial meletakkan gagasan Eropa tentang territorial kenegaraan ke dalam “keragaman kelompok komunal” di

<sup>51</sup> Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, (Terj.), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 111.

atas prinsip “memecah belah dan menguasai”. Sebagai akibatnya, dalam banyak masyarakat multi komunal pasca kolonial mesin negara menjadi “didominasi oleh kelompok tunggal atau koalisi dari segelintir kelompok komunal yang tidak merespon kebutuhan lainnya dalam masyarakat”, yang “menegangkan struktur sosial dan pada akhirnya melahirkan fragmentasi dan konflik sosial yang berlarut – larut”.<sup>52</sup>

*Kedua*, dengan mengikuti analisis penyelesaian konflik lainnya, Azar mengidentifikasi perampasan kebutuhan manusia sebagai sumber – sumber dari *PSC* yang tersembunyi (keluhan – keluhan yang berasal dari perampasan kebutuhan biasanya diekspresikan secara kolektif. Kegagalan penguasa untuk mengatasi masalah ini memperbesar terjadinya konflik sosial yang berlarut – larut). Kebutuhan – kebutuhan tersebut biasanya adalah kebutuhan keamanan, pengembangan, akses politik dan identitas. *Ketiga*, dalam dunia dimana negara telah “diberi otoritas untuk memerintah dan menggunakan kekuatan bila diperlukan untuk mengatur masyarakat, untuk melindungi warga negara, dan untuk menyediakan barang – barang secara kolektif”, Azar menyebutkan peran pemerintah dan negara sebagai faktor kritis dalam memuaskan atau mengecewakan keinginan dasar individu dan kelompok identitas. Menurutnya, kebanyakan negara yang mengalami konflik sosial berlarut – larut cenderung dicirikan oleh pemerintahan yang tidak mampu, picik, rapuh, dan otoriter yang gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia.<sup>53</sup>

Azar mencatat bagaimana *PSC* cenderung terkonsentrasi di dalam negara – negara Dunia Ketiga yang secara tipikal dicirikan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat dan sumber – sumber pokok yang terbatas dan juga mengandung “kapasitas politik” yang terbatas yang seringkali dihubungkan dengan warisan kolonial berupa institusi partisipasi yang lemah, sebuah tradisi hierarki untuk melaksanakan aturan birokrasi dari pusat metropolitan, dan warisan instrumen untuk melakukan tekanan – tekanan politik. Dalam negara – negara yang mengalami konflik sosial berlarut – larut, kemampuan politis dibatasi oleh struktur otoritas yang kaku atau rapuh yang mencegah negara untuk menanggapi

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm.113-114.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm.114-115.

dan memenuhi, beragam kebutuhan pihak – pihak yang berkepentingan. Akhirnya ada peran apa yang oleh Azar dinamakan “keterkaitan internasional”, khususnya dalam hubungan politik ekonomi dari dependensi ekonomi di dalam sistem ekonomi internasional, dan jaringan hubungan politik militer yang merupakan pola – pola regional dan global dari klien dan kepentingan lintas negara. Negara – negara modern, khususnya negara – negara yang lemah, ternyata rapuh terhadap kekuatan internasional yang beroperasi di dalam komunitas global yang lebih luas. “Formasi institusi sosial dan institusi politik dalam negeri serta dampaknya terhadap peran negara sangat dipengaruhi oleh pola hubungan di dalam sistem internasional.”<sup>54</sup>

Ada tidaknya empat kelompok pra kondisi untuk PSC pada kejadian konflik terbuka yang aktif ini akan bergantung pada tindakan yang lebih menyatu dan kejadian proses dinamis, yang oleh Azar dianalisa ke dalam tiga kelompok penentu: tindakan dan strategi komunal (dalam hal ini masyarakat), tindakan dan strategi negara maupun mekanisme konflik yang sudah terbangun. Dalam pandangan Azar, berdasarkan biaya politik dan ekonomi yang dirasakan dalam politik yang lemah dan terpecah – pecah dan arena norma *winner takes all* yang tetap berlaku dalam masyarakat antikomunal, tampaknya tindakan tersebut akan lebih merupakan penindasan dibandingkan akomodasi.<sup>55</sup>

## **I.6. Asumsi**

Berdasarkan perumusan masalah, maka asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah;

*Dalam konflik ekologi politik yang terjadi antara negara dan masyarakat Ogoni, ada perbedaan kepentingan yang mendasar yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan diantara dua aktor tersebut dalam kurun waktu 1993-1998. Ada perbedaan paradigma antara negara dan masyarakat dalam menerjemahkan sumber daya alam dan lingkungan. Bagi negara, sumber daya alam dan lingkungan lebih dinilai dari sudut kepentingan ekonomi politik yang potensial. Sedangkan bagi masyarakat sumber daya alam*

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 115-117.

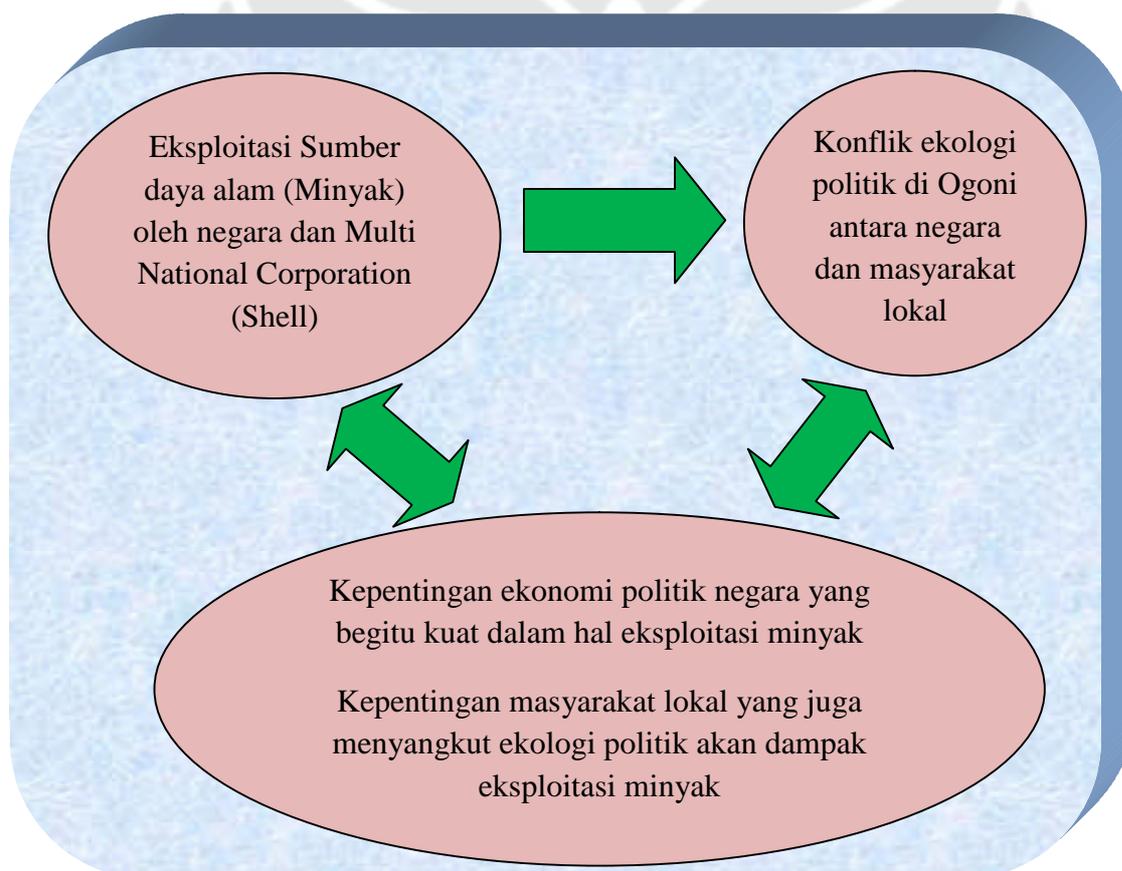
<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

*dan lingkungan tidak hanya dinilai dari sudut ekonomi politik saja, tapi juga kepentingan ekologi politik.*

### I.7. Model Analisis

Penelitian ini menggunakan tiga variabel<sup>56</sup>, yaitu: *Pertama*, variabel (x), yaitu eksploitasi sumber daya alam (Minyak) oleh perusahaan multi nasional dan negara. *Kedua*, variabel (y), yaitu konflik ekologi politik di Ogoni, Nigeria. *Ketiga*, variabel (z), yaitu kepentingan ekonomi politik negara yang begitu kuat akan dampak eksploitasi minyak, kepentingan masyarakat lokal yang juga menyangkut ekologi politik akan dampak eksploitasi minyak.

**Gambar 1.1. Model Analisis**



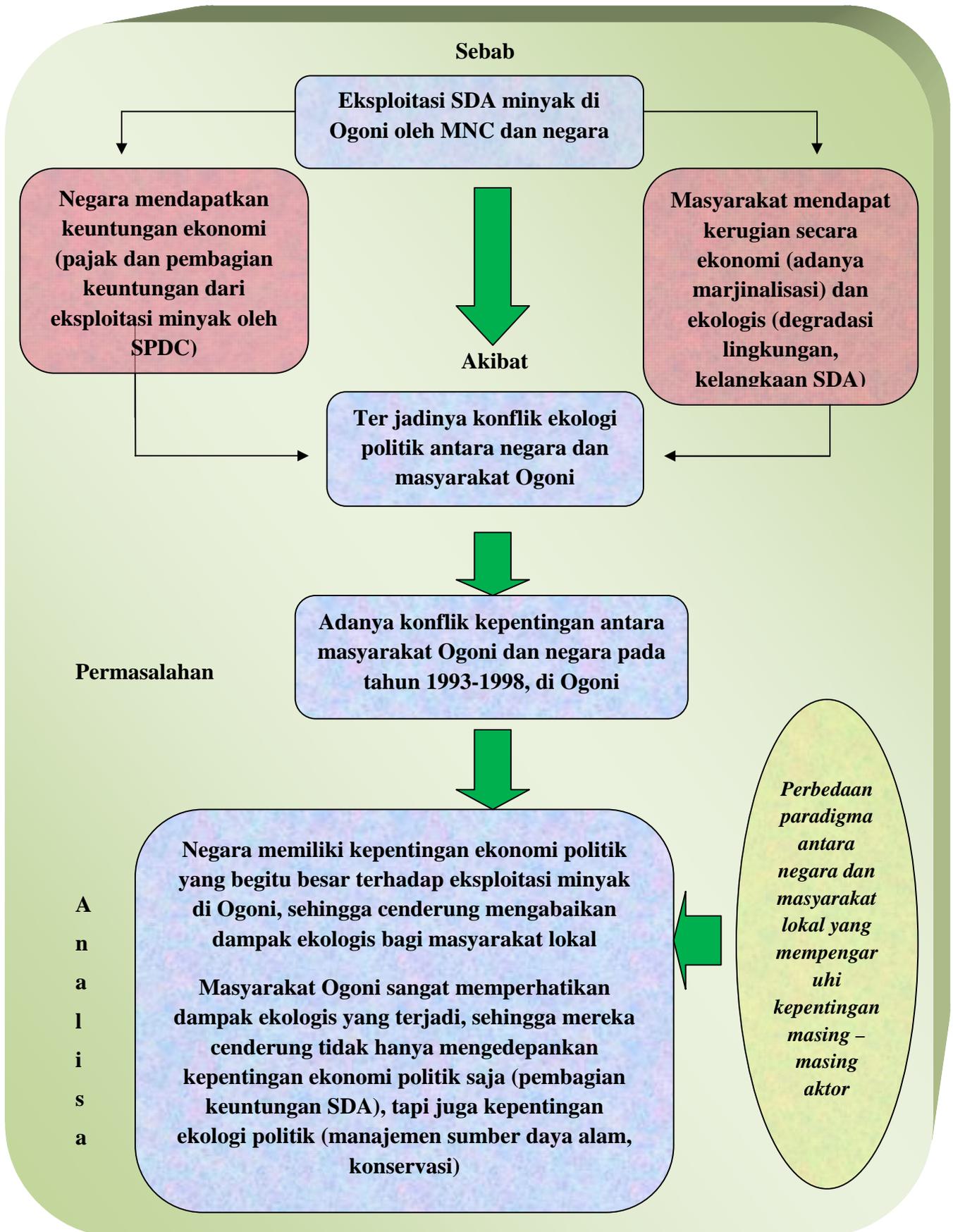
<sup>56</sup> David De Vaus, *Surveys in Social Research* (5th ed), (USA: Routledge, 2002), hlm. 22.

Keterangan:

-  Hubungan Kausalitas (sebab akibat)
-  Hubungan Kuat dan Langsung

Model analisa di atas menjelaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam (minyak) yang terjadi di Ogoni, Nigeria dilakukan oleh Shell dan juga negara. Industri minyak dapat dilihat sebagai sebuah lahan potensial yang amat menguntungkan bagi Shell dan pemerintah Nigeria sendiri, namun ternyata dibalik semua keuntungan yang diterima kedua pihak tersebut ada implikasi nyata yang harus diterima masyarakat lokal. Dilakukannya eksploitasi tersebut secara langsung memperlihatkan peran negara yang cukup kuat kepentingan ekonomi politiknya terhadap sumber daya minyak (dalam hal ini dapat dikatakan ekologi yang mengalami politisasi) yang ada di tanah Ogoni. Sedangkan bagi masyarakat sendiri, kepentingan mereka tidak hanya sebatas kepentingan ekonomi politik, tapi juga menyangkut kepentingan akan dampak ekologis yang mereka terima. Dengan kata lain, ada kepentingan ekologi politik yang kuat dari masyarakat. Perbedaan kepentingan yang mendasar itulah yang menyebabkan terjadinya konflik ekologi politik diantara negara dan masyarakat lokal (adanya konflik kepentingan) akan dampak eksploitasi lingkungan yang mereka terima secara ekologis dan berpengaruh pada permasalahan ekonomi. Dengan melihat konflik kepentingan yang terjadi akan terlihat korelasi yang terjadi terutama antara pemerintah dan masyarakat Ogoni yang pada akhirnya menjadi akar permasalahan dari konflik ekologi politik yang terjadi.

Gambar 1.2. Skema Alur Berpikir



## 1.8. Definisi Konsep

### 1.8.1. Ekologi Politik

Menurut Hempel, ekologi politik merupakan sebuah ilmu pengetahuan mengenai interdependensi antara unit – unit politik dan juga interrelasi antara unit – unit politik dengan lingkungan mereka, yang memberi perhatian pada konsekuensi politik dari perubahan lingkungan yang terjadi.<sup>57</sup> Sedangkan menurut Raymond L. Bryant, ekologi politik merupakan kajian yang berusaha untuk mengkaji dinamika pergerakan politik yang berkaitan dengan perjuangan dalam menguraikan permasalahan lingkungan hidup dan manusia terutama pada negara-negara dunia ketiga. Adanya kenyataan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan kekuasaan politik yang tertuang pada peraturan perundang-undangan pemerintah mengenai lingkungan hidup. Perhatian ekologi politik terutama terfokus pada terjadinya konflik yang disebabkan pada perebutan akses pengelolaan sumberdaya alam yang dapat dihubungkan dengan sistem politik dan kontrol ekonomi, yang pada kenyataannya telah ada semenjak zaman kolonialisme.<sup>58</sup>

### 1.8.2. Konflik Ekologi Politik

Konflik ekologi politik adalah sebuah konflik yang terjadi akibat meningkatnya kelangkaan melalui pembatasan akses terhadap sumber daya yang dilakukan oleh otoritas negara, perusahaan – perusahaan swasta, atau elit masyarakat yang mempercepat terjadinya antar kelompok masyarakat (baik gender, kelas, maupun kelompok etnis). Biasanya permasalahan lingkungan menjadi politis karena kelompok – kelompok masyarakat (gender, kelas atau etnis) melakukan pengamanan dengan mengontrol sumber daya kolektif tersebut dari intervensi usaha – usaha mencari keuntungan seperti yang dilakukan oleh pemerintah, agen – agen negara, atau pihak swasta. Dengan demikian keberadaan dan konflik yang berkepanjangan di dalam dan diantara masyarakat menjadi ekologis dengan adanya pengaruh perubahan kebijakan untuk mengedepankan pembangunan atas konservasi maupun sumber daya alam yang tersedia.<sup>59</sup> Senada dengan hal tersebut, Johnston juga mengemukakan bahwa konflik ekologi politik merupakan hasil dari perubahan sosial dan

---

<sup>57</sup> Paul Robbins, *Political Ecology* (Oxford: Blackwell Publishing, 2004), hlm. 6.

<sup>58</sup> Raymond L. Bryant, *op.cit.*, hlm. 84.

<sup>59</sup> Paul Robbins, *op.cit.*, hlm. 173.

degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh globalisasi yang digembar – gemborkan oleh otoritas negara dengan tujuan untuk pembangunan dan pertahanan nasional.<sup>60</sup> Bryant menambahkan, bahwa konflik ekologi politik ini lebih menggambarkan kepada pertarungan atas suatu hal yang berharga lebih daripada perjuangan di atas praktek – praktek yang menguntungkan secara materi.<sup>61</sup>

### 1.8.3. Degradasi Lingkungan

Degradasi lingkungan menurut Johnson dan Lewis dimaksudkan sebagai kerusakan substansial di dalam atau keseluruhan daerah yang secara biologis produktif (menghasilkan) atau cukup bermanfaat, dikarenakan campur tangan manusia. Hal ini bisa termasuk berkurangnya aktifitas perikanan sebagai akibat dari meningkatnya pertanian atau industri, berkurangkannya produktifitas pertanian dikarenakan berkurangnya tingkat kesuburan tanah akibat pencemaran, atau bisa juga berkurangnya jumlah satwa akibat perburuan dan rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa degradasi lingkungan adalah hilangnya sebuah sumberdaya sebagai akibat dari meningkatnya produksi materi atau sumber daya lain.<sup>62</sup>

Sedangkan menurut Blaike dan Brookfield, degradasi lingkungan mengandung banyak interpretasi. Tergantung kepada situasi di daerah yang bersangkutan. Untuk itu pemilihan kriteria terutama aspek politik yang terkandung di dalamnya, dapat dikondisikan sesuai dengan tujuan dari investigasi dan kategori – kategori yang menjadi perhatian dari peneliti yang bersangkutan. Kemungkinan untuk berbagai macam intepretasi akan sangat banyak, tapi ada beberapa kategori utama dalam ekologi politik yang menyangkut makna dari degradasi lingkungan, diantaranya.<sup>63</sup>

1. Hilangnya produktivitas alam
2. Hilangnya keanekaragaman hayati

---

<sup>60</sup> Domingo A. Medina, “From Keeping it Oral to Writing to Mapping: The Kuyujani Legacy and the De’kuana Self-Demarcation Project”, dalam Neil L. Whitehead (ed.), *Histories and Historicities in Amazonia* (Lincoln: University of Nebraska Press, 2003), hlm.3.

<sup>61</sup> Raymond L. Bryant, *op.cit.*

<sup>62</sup> Paul Robbins, *op.cit.*, hlm.91.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 91-92.

3. Hilangnya kegunaan/ fungsi
4. Menciptakan atau menempatkan resiko ekologi

Masing - masing dari kategori di atas dapat dimaknai berbeda – beda, dan dapat dievaluasi dalam berbagai cara. Namun konsep degradasi lingkungan yang benar – benar bebas dari asumsi politik hingga kini masih diperdebatkan.

### **I.9. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat eksplanatif.<sup>64</sup> Metode kualitatif adalah salah satu metode dalam ilmu sosial yang mencoba menjelaskan hubungan antar gejala sesuai dengan fokus pembahasan dan tidak melakukan pengukuran hubungan antar gejala seperti metode kuantitatif. Metode kualitatif mencoba menggambarkan realitas sosial dan fokus pada proses interaksi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan analisa yang tematis. Penelitian eksplanatif tidak hanya berusaha menggambarkan suatu gejala, tetapi mencari penyebab dan alasan “mengapa” sebuah gejala dapat terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* yang hanya menggunakan satu sumber, yaitu data sekunder saja. Data sekunder yang dimaksud adalah studi literatur, menggunakan sumber-sumber kepustakaan.<sup>65</sup>

Data-data yang digunakan mencakup buku-buku, jurnal ilmiah internasional, data laporan ilmiah dan dokumen yang terkait dengan permasalahan konflik ekologi politik di Nigeria. Lokasi penelitian ini dilakukan ditempat peneliti mendapatkan data temuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, seperti perpustakaan kampus, perpustakaan kedutaan, melalui akses via kampus untuk mendapatkan jurnal – jurnal online, ataupun instansi lainnya yang dianggap perlu dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

---

<sup>64</sup> Ritchi, Jane dan Jane Lewis, *Qualitative Research A Guide for Social Students and Researchers* (London: Sage Publications, 2003), hlm. 24.

<sup>65</sup> W. L. Neuman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach* (Needham Heights, Massachusetts: Allyn & Bacon, 2000), hlm. 16-22.

### **I.10. Keterbatasan Penulisan**

Pada penelitian ini peneliti tidak dapat melakukan pembahasan yang terlalu mendalam terhadap gerakan lingkungan di Ogoni, hal ini dikarenakan gerakan lingkungan dalam skripsi ini dilihat peneliti sebagai salah satu aktor dari dua aktor yang dibahas. Begitu pula halnya dengan penjelasan mengenai rezim militer dan kaitannya dengan ekonomi politik negara yang tidak bisa digambarkan secara komprehensif di dalam skripsi ini. Selain itu peneliti tidak dapat menjabarkan dinamika konflik secara lengkap dikarenakan kurun waktu konflik yang terjadi di Ogoni cukup lama, dan sebagai acuan atau gambaran umum dari konflik yang terjadi di Ogoni, peneliti mengambil kurun waktu tahun 1993-1998. Dengan demikian diharapkan dapat menjelaskan secara umum pula tentang apa yang sebenarnya kepentingan yang terdapat di balik konflik yang terjadi di Ogoni akibat aktivitas eksplorasi dan eksplotasi minyak tersebut dalam kajian ekologi politik. Sehingga analisis baik terhadap aktor – aktor maupun konflik yang terjadi akan lebih ditekankan kepada analisis ekologi politik.

Karena keterbatasan waktu, dana penelitian, sumber atau bahan terkait dengan wacana ekologi politik di Nigeria, maupun keterbatasan hal-hal teknis lainnya, peneliti hanya sanggup melakukan pengumpulan data-data secara sekunder dalam kerangka penelitian kualitatif, bukan data-data primer.

### **1.11. Sistematika Penulisan**

#### **Bab 1. Pendahuluan**

Berisi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, asumsi, model analisa, definisi konsep, metode penelitian, keterbatasan penulisan dan sistematika penelitian.

#### **Bab 2. Negara dan Ekonomi Politik Industri Minyak di Nigeria**

Pada bab ini penulis ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai pengaruh, dampak maupun peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam minyak di Nigeria di bawah rezim militer. Pengelolaan SDA di sini akan lebih ditekankan kepada pengelolaan SDA Minyak bumi, berikut beberapa perubahan kebijakan

terkait yang dikeluarkan oleh rezim pemerintahan militer baru sepanjang tahun 1993-1998. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa subbab diantaranya; *Pertama*, kontribusi industri minyak bagi perekonomian Nigeria. *Kedua*, kebijakan pengelolaan industri minyak di Nigeria. *Ketiga*, peran SPDC dalam industri minyak di Nigeria. *Keempat*, kepentingan ekonomi politik pemerintah rezim militer atas industri minyak di Nigeria.

### **Bab 3. Masyarakat Ogoni dan Ekonomi Politik Lingkungan Industri Minyak di Ogoni**

Pada bab ini akan dibahas mengenai keadaan masyarakat lokal Ogoni sendiri. Apa yang terjadi pada masyarakat lokal yang berada di daerah kaya minyak seperti Ogoni. Untuk itu akan dibagi menjadi beberapa subbab diantaranya: *Pertama*, konteks alam tanah Ogoni dan masyarakat Ogoni. *Kedua*, dampak eksploitasi minyak di Ogoni. Pada subbab ini peneliti akan membahas berbagai dampak yang muncul akibat eksploitasi minyak di tanah Ogoni. *Ketiga*, peran dan pengaruh *Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP)* dalam perjuangan masyarakat Ogoni. *Keempat*, dinamika konflik antara negara versus masyarakat Ogoni tahun 1993-1998 akibat degradasi lingkungan

### **Bab 4. Konflik Ekologi Politik antara Negara versus Masyarakat Ogoni, Pada Tahun 1993-1998**

Pada bab ini akan dibahas dinamika konflik kepentingan yang muncul akibat degradasi lingkungan yang terjadi di Ogoni. Di sini akan digambarkan aksi dan reaksi yang terjadi antara pemerintah dan gerakan sosial masyarakat Ogoni (*MOSOP*) dengan menggunakan teori konflik dan juga melihat peran negara maupun masyarakat lokal dalam konteks ekologi politik di negara Dunia Ketiga. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab diantaranya: *Pertama*, Nigeria dan Negara Birokratis Otoriter. *Kedua*, *Actor Approach* dan interkoneksi dalam kajian ekologi politik. *Ketiga*, konflik kepentingan antara negara versus masyarakat Ogoni (*Tinjauan Analisa Teori Konflik Sosial yang Berkepanjangan (Protracted Social Conflict)*).

## **Bab 5. Penutup**

Berisi kesimpulan yang menegaskan kembali permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dan juga membahas mengenai temuan analisis berupa jawaban rumusan permasalahan yang sebelumnya diajukan oleh peneliti pada bagian awal penelitian.

